

POTRET PENDIDIKAN SEJARAH DI AKADEMI KEPOLISIAN UNTUK PEMBENTUKAN KARAKTER POLISI SIPIL

Subagyo

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

sby_fis@staff.unnes.ac.id

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of historical education for the Police Academy cadets and the various problems that occur. The data were collected from curriculum documents, lesson plans and informants. The data collecting techniques used the document study and interviews. The analysis used the interactive analysis. The results show that the lesson-time for historical education only becomes a small part of the educational process at Police Academy. In the cadets' force 44, the historical education is given through the course of Police History. This course provides an understanding of the role of the police from different eras. However, the allocation time given to this course is very few. The problem faced is about the education which more focuses on building the skills.

Key words: historical education, civil police, police academy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan sejarah bagi taruna Akademi Kepolisian dan berbagai permasalahan yang terjadi. Data dihimpun dari dokumen kurikulum dan perencanaan pembelajaran dan informan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Analisis menggunakan analisis interkaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jam pelajaran untuk pendidikan sejarah hanya menjadi bagian kecil dari proses pendidikan di Akademi Kepolisian. Pada taruna angkatan 44, pendidikan sejarah diberikan melalui mata kuliah Sejarah Kepolisian. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang peran Polri dari berbagai masa. Namun demikian, alokasi waktu yang diberikan dalam mata kuliah ini sangat sedikit. Permasalahan yang dihadapi adalah tentang lebih terfokusnya pendidikan ke arah pembentukan keterampilan.

Kata kunci: pendidikan sejarah, polisi sipil, akademi kepolisian.

PENDAHULUAN

Polisi sipil merupakan satu perspektif baru dalam perkembangan kepolisian Indonesia. Munculnya paradigma polisi sipil bersamaan dengan perkembangan konsep masyarakat madani (*civil society*). Polisi sipil merupakan tujuan dan agenda utama dari reformasi kepolisian itu sendiri (Muradi, 2007:18; IDSPS, 2008:2). Dalam konteks Indonesia, hal ini tampak dengan ada-

nya keputusan politik memisahkan Polri dari institusi dan garis komando TNI pada 1 April 1999 dengan adanya Inpres No. 2 Tahun 1999. Putusan tersebut diperkuat dengan penetapan Tap MPR/VI/2000 tentang pemisahan ABRI (TNI dan Polri) serta Tap MPR/VII/2000 tentang peran kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan, khusus Polri berada langsung di bawah Presiden. Tindak lanjut dari keluarnya kedua Tap

MPR tersebut adalah dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang berkaitan juga dengan peran dan posisi TNI dalam peran perbantuannya pada Polri.

Polisi sipil dapat dipahami sebagai watak kepolisian yang menjunjung tinggi hak-hak sipil melalui tindakan-tindakan yang menjunjung tinggi pendekatan kemanusiaan. Pemahaman polisi sipil seperti dijelaskan di atas senada dengan visi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menekankan bahwa Polri menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat; penegak hukum yang profesional dan proporsional serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM; pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Namun demikian, upaya mewujudkan polisi sipil masih banyak menemui kendala. Hal ini tampak dari berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh kepolisian. Perubahan paradigma perpolisian dari lembaga yang bercitra militeristik menjadi lembaga yang cenderung ke arah sipil ternyata masih mengalami beberapa permasalahan. Oleh karena itu, penataan Polri terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat. Sebagai dasar untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang handal. Oleh karena itu, untuk mewujudkan SDM yang memadai, perlu persiapan melalui proses pendidikan.

Dalam perkembangan selanjutnya

diharapkan melalui pendidikan Polri dapat terbangun polisi yang berkarakter sipil, sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi dan tugasnya. Pencitraan Polri akan membaik seiring pembinaan SDM yang makin berkualitas. Hal itu dapat dimulai dan secara serius dilakukan melalui lembaga pendidikan Polri khususnya pada Akademi Kepolisian. Proses pendidikan bagi calon perwira Polri (Taruna Akademi Kepolisian) menjadi sangat strategis, karena ke depan perwira muda inilah yang akan berperan dalam pengembangan Polri.

Proses pendidikan di Akademi Kepolisian (Akp) sebagai bagian dari pendidikan Polri secara total memberi pengaruh yang besar dalam menata kelembagaan Polri di masa depan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan suatu organisasi tidak terlepas dari peran pemimpin. Di bawah kepemimpinan yang handal kesuksesan dapat dicapai. Demikian pula yang terjadi pada lembaga pendidikan Akp, kepemimpinan memberikan kontribusi dan dasar dalam membangun karakter polisi sipil Taruna Akp, melalui proses pendidikan/pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Keberhasilan membangun karakter polisi sipil yang dimulai dari sejak masa pendidikan inilah nantinya diharapkan akan dapat menghasilkan SDM yang mampu memberikan pelayanan, pengayoman, perlindungan, memelihara ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta HAM.

Upaya mewujudkan karakter polisi sipil dilakukan melalui proses pendidikan di Akademi Kepolisian. Berdasarkan penelitian Subagyo (2012), komponen pendidikan memiliki peran penting dalam membangun karakter polisi sipil. Namun demikian, pada komponen pendidikan aspek yang dianggap kurang adalah indikator nilai-nilai kesejarahan bagi polisi sipil

(Subagyo, 2012: 269). Dari pemikiran di atas, tulisan ini secara spesifik mencoba mendeskripsikan kurikulum di Akademi Kepolisian dan pelaksanaan penanaman nilai-nilai kesejarahan di Akademi Kepolisian. Dengan demikian, tulisan ini dapat memberikan kontribusi tentang pengembangan nilai kesejarahan yang optimal dalam pendidikan bagi polisi sipil.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Akademi Kepolisian Semarang pada Januari-Juni 2012. Penelitian difokuskan di Taruna Akademi Kepolisian angkatan 44. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri atas dokumen, tenaga pendidik, dan taruna Akpol. Pengumpulan data menggunakan analisis dokumen dan wawancara. Validitas data menggunakan teknik triangulasi penelitian. Analisis menggunakan analisis data interaktif, yang terdiri atas tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan yang dilakukan secara siklus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan di Akademi Kepolisian

Akademi Kepolisian (Akpol) adalah unsur pelaksanaan pendidikan pembentuk Perwira Polri yang berada di bawah Kapolri. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Kepolisian, tugas pokok Akpol adalah bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan perwira Polri yang bersumber dari masyarakat umum. Seiring dengan beralihnya status Polri yang ti-

dak lagi menjadi bagian dari ABRI, maka sejak tanggal 10 April 1999 Akpol yang dipimpin oleh Gubernur, merupakan badan pelaksana pusat yang secara struktural berkedudukan langsung di bawah Kapolri, yang juga menyelenggarakan Pendidikan pertama sumber sarjana (PPSS), yaitu pendidikan perwira Polri yang direkrut dari S1 dan D3.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Akpol menyelenggarakan fungsi, yaitu (1) Menyelenggarakan pendidikan calon perwira Polri dari SMA dan sederajat; (2) Menyelenggarakan pendidikan calon perwira Polri dari Sarjana dan D3; (3) Menyelenggarakan publikasi dan kerjasama dalam rangka menjaring peminat/peserta pendidikan calon perwira baik Akpol dan PPSS; (4) Menyelenggarakan kerjasama dengan TNI dan lembaga lainnya; (5) Pengkajian dan pengembangan sistem pendidikan Akpol, termasuk materi dan kurikulum pendidikan.

Sistem pendidikan Kepolisian telah menetapkan bahwa Akpol termasuk pada pendidikan jalur sekolah yang diselenggarakan melalui jalur sekolah Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) dengan kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan; dan termasuk pada jenis pendidikan profesi Kepolisian, yakni pendidikan yang menghasilkan calon dan pendidikan personel Polri yang memiliki kemampuan profesional Kepolisian, memiliki gelar akademik, namun dapat diberikan sebutan profesional sesuai ketentuan yang berlaku dalam sistem pendidikan nasional dan sesuai dengan kepentingan institusi Kepolisian Negara RI. Dengan demikian, Akpol merupakan jenjang pendidikan profesi Kepolisian yang menyelenggarakan Pendidikan Pembulatan Kepolisian.

Pendidikan bulat Kepolisian berdasarkan petunjuk Induk (Skep Kapolri No. Pol.: Skep/962/XI/2002, tanggal 29

Nopember 2002) ditentukan 6 semester/3 tahun berturut-turut, ditambah 6 bulan magang. Pada program pendidikan (Kep Kapolri: No.Pol: Kep/60/XII/2002, tanggal 27 Desember 2002) pada lampiran "B" keputusan tersebut Akpol mempergunakan pola pendidikan 5:3, artinya 5 bulan digunakan untuk pendidikan dasar dan matrikulasi yang masing-masing 2,5 bulan, dan 3 tahun untuk proses belajar mengajar.

Pendidikan dasar di Akpol berlangsung sejak pertama kali Taruna/Taruni masuk pendidikan, dan terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu: (1) tahap orientasi; (2) tahap pembentukan fisik; (3) tahap pembentukan dasar bhayangkara; (4) tahap pembulatan (*lat pra wira bhara*).

Setelah selesai pendidikan dasar, dilanjutkan dengan matrikulasi, yaitu program prasyarat yang akan ditempuh dengan tujuan untuk memenuhi kekurangan supaya bisa setara dengan peserta lain yang ikut dalam program pendidikan yang sedang ditempuh.

Selesai matrikulasi, dilanjutkan dengan pendidikan matra kepolisian yang berlangsung dalam 6 semester dengan mata kuliah sebagaimana tertuang dalam struktur kurikulum ditambah 6 bulan magang. Pengaturan waktu kegiatan akademik sebanyak 10 jam, kegiatan pengasuhan 6 jam, dan waktu istirahat 8 jam. Untuk memperlihatkan tampilan ideal pola pendidikan Akpol, menggunakan pola 5:3, di mana magang dilaksanakan setelah Taruna dilantik sebagai perwira dan dilaksanakan di tempat perwira bertugas/diserahkan ke Satwil untuk pelaksanaan magangnya. Pola ini cukup relevan untuk melaksanakan sistem pendidikan, karena dalam proses pembelajaran diperlukan tahapan-tahapan hingga membentuk perwira kepolisian yang profesional.

Saat ini di Akpol pendidikan pada

tiap-tiap tingkat/pangkat dilakukan pembulatan dengan adanya latihan kerja. Latihan kerja yang dilaksanakan oleh Taruna tingkat I adalah pengetahuan-pengetahuan tamtama, sedangkan Taruna tingkat II berupa pengetahuan-pengetahuan bintangara, dan Taruna tingkat III berupa pengetahuan-pengetahuan perwira.

Pendidikan yang dilaksanakan di Akpol bertujuan memperoleh *output* perwira yang terampil melaksanakan tugas kepolisian umum, oleh karena itu pendidikan Akademi Kepolisian tidak lagi diarahkan untuk kualifikasi kepangkatan tertentu, tetapi lebih bersifat penjurangan ke arah kualifikasi umum dan pengenalan. Untuk Taruna tingkat I lebih diarahkan pada proses pembentukan dan pengenalan awal yang berorientasi terhadap pengenalan tugas pokok dan fungsi Polri; pendidikan untuk Taruna tingkat II lebih diarahkan pada proses pematangan dan pengenalan lanjutan yang berorientasi pada pendalaman tugas kepolisian umum; sedangkan pendidikan untuk Taruna tingkat III diarahkan pada proses pendewasaan dan pembulatan yang berorientasi pada aktualisasi tugas Polri.

Di akhir pendidikan Taruna tingkat III sampai saat ini terdapat kegiatan integrasi dengan Taruna Akademi TNI (*Sitarda dan Praspa*). Oleh karena itu, agar kegiatan Taruna Akpol dapat diintegrasikan dengan kegiatan Akademi TNI, maka kalender Akademik Semester I Akpol dimulai pada bulan Januari (Lebang, 2003:91).

Penanaman Nilai Sejarah di Akademi Kepolisian

Sejarah memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan manusia pada masa sekarang. Subagyo (2010:52) dan Wasino (2007:14) menyebutkan bahwa

paling tidak ada beberapa guna sejarah bagi manusia yang mempelajarinya, yakni (1) edukatif (untuk pendidikan), (2) instruktif (memberikan insruksi/perintah), (3) inspiratif (memberi ilham), serta (4) rekreatif (memberikan kesenangan).

Sejarah memiliki fungsi edukatif (untuk pendidikan) karena dengan memahami sejarah berarti telah diambil satu manfaat atau hikmah dari terjadinya suatu peristiwa sejarah. Kaitannya antara sejarah dan pendidikan, ada sebuah kalimat bijak tentang peranan sejarah bagi manusia yang berbunyi *historia vitae magistra* yang bermakna “sejarah adalah guru kehidupan”. Makna sejarah sebagai guru kehidupan ini sangat dalam, karena memerlukan pemikiran mengapa sampai sejarah itu digunakan sebagai guru kehidupan. Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa sejarah memiliki fungsi pendidikan, yang mengajarkan bagaimana manusia seharusnya bertindak dengan melihat peristiwa yang telah terjadi untuk kemudian diambil hikmahnya. Kuntowijoyo (1995:24) menerangkan bahwa ada beberapa fungsi sejarah kaitannya dengan sarana pendidikan, yaitu sebagai pendidikan moral, penalaran, politik, kebijakan, perubahan, masa depan, dan keindahan.

Fungsi kedua dari sejarah adalah fungsi instruktif. Sejarah sebagai aktivitas manusia pada masa lampau memiliki fungsi untuk memberikan pelajaran mengenai suatu keterampilan atau pengetahuan, misalnya pengetahuan tentang taktik militer, navigasi, teknologi senjata, jurnalistik (Subagyo, 2010:70).

Fungsi berikutnya dari sejarah adalah fungsi inspiratif. Fungsi inspirasi maksudnya adalah bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh manusia pada masa lampau mampu memberikan

inspirasi atau ilham bagi manusia yang hidup pada masa kini. Tindakan-tindakan kepahlawanan dalam sejarah dapat mengilhami masyarakat pada perjuangan yang sekarang. Contoh dari fungsi sejarah sebagai inspirasi adalah seperti patriotisme yang terpatri dalam jiwa rakyat Indonesia ketika menghadapi kolonialisme asing, memberi inspirasi bagi bangsa Indonesia pada masa kini untuk terus menerus bekerja keras, rela berkorban, dan menjaga persatuan agar cita-cita dan tujuan Indonesia dapat tercapai.

Fungsi keempat dari sejarah adalah fungsi rekreatif, maksudnya adalah bahwa sejarah dapat memberikan kesenangan lain kepada generasi sekarang. Sejarah membawa manusia kepada nostalgia dan kisah-kisah yang dramatis, indah, dan sebagainya. Dengan sejarah kita seolah-olah berpariwisata ke negeri-negeri jauh, menyaksikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam suasana yang berlainan dengan suasana kita pada masa sekarang.

Dari keempat fungsi atau guna sejarah seperti yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa fungsi atau guna lain dari sejarah yang merupakan turunan dari keempat fungsi atau guna sejarah tersebut. Fungsi tersebut antara lain adalah sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme, sampai pada fungsi untuk memprediksi masa depan melalui refleksi terhadap peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau.

Oleh karena sejarah memiliki guna yang strategis, sebagaimana dinyatakan Collingwood (1990:254) “bahwa mengenal diri sendiri berarti mengenal apa yang kita mampu lakukan; dan karena tidak seorangpun mengetahui apa yang bisa dia perbuat sampai dia mencobanya, maka satu-satunya kunci untuk mengetahui apa

yang bisa diperbuat seseorang adalah apa yang telah dia perbuat, maksudnya adalah dari sejarah masa lampauya". Dengan demikian, kegunaan sejarah menurut Collingwood bagi manusia adalah untuk mengenal dirinya sendiri. Hal senada juga diungkapkan oleh Wineburg (2006:8) bahwa "sejarah memiliki potensi untuk menjadikan kita manusia yang berperikemanusiaan, hal yang tidak dapat dilakukan oleh mata pelajaran lain dalam kurikulum sekolah."

Kaitannya dengan upaya untuk mengenali dirinya sendiri, pendidikan sejarah berarti mengajarkan kepada manusia satu langkah menuju kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah merupakan satu kondisi kejiwaan yang menunjukkan tingkat penghayatan pada makna dan hakikat sejarah bagi masa kini dan masa yang akan datang, serta menjadi dasar bagi berfungsinya makna sejarah dalam proses pendidikan.

Berbagai tujuan yang telah dipaparkan oleh para ahli kaitannya dengan tujuan mempelajari sejarah, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sejarah bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik dengan mengacu pada pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau sehingga

dalam diri peserta didik terwujud satu kesadaran sejarah. Dengan adanya hal tersebut, maka menjadikan posisi sejarah khususnya sejarah Polri (Subagyo, 2001:52) menjadi penting dalam upaya membentuk karakter polisi sipil, karena dalam sejarah para Taruna diberikan tentang berbagai pengalaman dan pengetahuan tentang perjuangan polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Bagi Taruna Akademi Kepolisian, materi sejarah yang bermanfaat dalam pengembangan karakter polisi sipil adalah sejarah tentang kepolisian Indonesia dan sejarah nasional Indonesia. Keduanya terangkum dalam mata kuliah Sejarah Kepolisian. Materi sejarah yang spesifik hanya diberikan di Akpol adalah materi sejarah perjuangan Polri.

Mata kuliah Sejarah Kepolisian dialokasikan waktu sebanyak 16 jam pelajaran. Mata kuliah ini menjadi bagian dari proses awal pendidikan taruna, yakni pada tahap Pembentukan Dasar Bhayangkara yang diberikan pada semester awal di bulan Agustus sampai Desember 2009. Tabel 1 menunjukkan susunan materi yang diberikan pada Tahap Pembentukan Dasar Bhayangkara.

Mata kuliah sejarah kepolisian menjadi bagian dari rumpun mata kuliah Pembentukan Sikap dan Mental

Tabel 1. Rumpun Mata Kuliah pada Tahap Pembentukan Dasar Bhayangkara

No	Rumpun MK	Jam Pelajaran
1	Pembentukan Sikap dan Mental sebagai Insan Polri	80 jam pelajaran
2	Pengetahuan Kesehatan	16 jam pelajaran
3	Pengetahuan dan Keterampilan	136 jam pelajaran
4	Pembentukan fisik	128 jam pelajaran
	Total	360 jam pelajaran

Sumber: Peta Kurikulum Akademi Kepolisian

Tabel 2. Mata Kuliah pada Tahap Pembentukan Sikap dan Mental Sebagai Insan Polri

No	Mata Kuliah	Jam Pelajaran
1	Pengetahuan Agama	16 jam pelajaran
2	Motivasi Berprestasi/ Achievement	16 jam pelajaran
3	Budi Pekerti	16 jam pelajaran
4	Sejarah Kepolisian	16 jam pelajaran
5	Pedoman Hidup (Tribrata dan Catur Prasetya)	16 jam pelajaran
	Total	80 jam pelajaran

Sumber: Peta Kurikulum Akademi Kepolisian

Sebagai Insan Polri. Pada tabel 2 ditunjukkan posisi Sejarah Kepolisian sebagai bagian penanaman sikap dan mental taruna.

Perkembangan sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia menekankan keterkaitan antara polisi dengan sejarah nasional Indonesia. Polri senantiasa menjadi unsur penting dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Pada materi sejarah Kepolisian RI memberikan gambaran tentang perkembangan kepolisian dan perjuangan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Subagyo (2001:59) menjelaskan bahwa banyak hal yang dapat diambil hikmahnya dari perjalanan sejarah Polri. Generasi muda dan pemimpin Polri dapat menggunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya pada saat ini dan mendatang.

Dalam buku *Sejarah Kepolisian di Indonesia* (Mabes Polri, 1999) yang diberikan bagi Taruna Akpol materi yang tersaji terkait dengan sejarah kepolisian RI. Materi tersebut mencakup sejarah kepolisian Indonesia dari masa kerajaan, VOC, masa Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang, sampai masa kemerdekaan. Selain itu, dijelaskan pula sejarah perjuangan Polri yang dapat dijadikan teladan tentang peran serta Polri

yang vital dalam kehidupan masyarakat, seperti perjuangan Polri sekitar proklamasi, perjuangan menghadapi sekutu, menghadapi agresi militer Belanda I dan II, peran Polri dalam serangan umum 1 Maret 1949, serta peranan Polri dalam operasi keamanan dalam negeri.

Selain itu, ada pula diktat yang disusun oleh FX Suwandi dan Subagyo (2001) berjudul *Sejarah Perjuangan Polri*. Di dalamnya termuat beberapa bab. Bab pertama tentang pendahuluan. Bab ini mengulas pengertian sejarah, metode sejarah, fungsi sejarah, guna sejarah, dan memahami sejarah perjuangan Polri.

Bab kedua berisi sejarah kepolisian di Indonesia. Dalam bab ini, diungkapkan beberapa materi, yakni (1) kepolisian masa kerajaan di Indonesia; (2) kepolisian masa VOC; (3) kepolisian pada masa Hindia Belanda; (4) kepolisian masa pendudukan Jepang; (5) kepolisian masa kemerdekaan.

Bab ketiga menjelaskan sejarah perjuangan Polri. Bab ini berisi enam subbab, yakni (1) sekitar proklamasi; (2) menghadapi tentara sekutu; (3) menghadapi Agresi Militer Belanda I; (4) menghadapi Agresi Militer Belanda II; (5) peran Polri dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta; (6) peran Pol-

ri dalam Operasi Komdagri. Sementara itu, bab empat adalah tentang fungsi teknik kepolisian dan bab lima adalah penutup.

Upaya untuk menunjang mata kuliah Sejarah Kepolisian di Akpol terdapat Museum Polri. Museum ini menyajikan beragam media tentang perkembangan kepolisian di Indonesia. Koleksinya antara lain terdiri dari foto-foto bersejarah, macam-macam senjata, replika bom Bali, foto satelit yang mengabadikan gelombang tsunami. Ada juga koleksi pakaian seorang alumni Akpol yang tewas sewaktu berusaha menyelamatkan korban tsunami, Mini Ruwa, Evokatif, Patung, Foto, Senjata berat, Senjata ringan, Pistol, Senjata tradisional, Tombak/Pedang, Kaporlap, Replika Bom Bali, Diratram, Lukisan giat Polri.

Pelaksanaan perkuliahan Sejarah Kepolisian dalam pelaksanaannya dilakukan selama delapan pertemuan. Mata kuliah ini memiliki kompetensi “memberikan pengetahuan tentang perkembangan Polri sejak perang kemerdekaan sampai dengan Polri pada masa reformasi”. Standar kompetensi yang dikembangkan adalah (1) memahami kepolisian pada masa pranasional; (2) memahami Polri pada masa Perang Kemerdekaan (1945-1949); (3) memahami Polri pada masa RIS (1949-1950); (4) memahami Polri pada masa Demokrasi Parlementer (1950-1959); (5) memahami Polri pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966); (6) memahami Polri pada masa Orde Baru (1966-1998) dan; (7) memahami Polri pada masa Reformasi (1998-kini).

Pada pertemuan pertama kuliah Sejarah Kepolisian menekankan pada standar kompetensi “memahami kepolisian pada masa pranasional”. Pada pertemuan I kompetensi dasar yang dicapai adalah (1) menceritakan fungsi kepolisian pada masa klasik; (2) mem-

bedakan kepolisian pada masa VOC, Belanda, Inggris, Perancis, dan Hindia Belanda; (3) menggambarkan kepolisian pada masa pendudukan Jepang.

Indikator pencapaian kompetensi dalam pertemuan I terdiri atas beberapa komponen. *Pertama*, menjelaskan keamanan sebagai kebutuhan manusia dan fungsi kepolisian di kerajaan-kerajaan di Indonesia. *Kedua*, menjelaskan kepolisian pada masa VOC (1602-1799), kepolisian masa Perancis (1808-1811), kepolisian masa kekuasaan Inggris (1811-1816). *Ketiga*, menjelaskan kepolisian masa Hindia Belanda. *Keempat*, menjelaskan kepolisian masa pendudukan Jepang (*Keisatsutai* dan *Tokubetsu Keisatsutai*).

Pertemuan kedua mata kuliah Sejarah Polri memiliki standar kompetensi “memahami Polri dalam masa Perang Kemerdekaan (1945-1949)”. Kompetensi dasar pada pertemuan kedua adalah (1) menceritakan kepolisian setelah Proklamasi Kemerdekaan; (2) mendeskripsikan lahirnya kepolisian nasional 1 Juli 1946; (3) menceritakan lahirnya pendidikan kepolisian bagian menengah dan tinggi.

Pada pertemuan ini, terdapat tiga indikator pencapaian kompetensi. *Pertama*, menjelaskan Polri dalam merebut senjata Jepang, Peran Polri dalam menghadapi Agresi militer Belanda I dan II, dan peran Polri dalam menumpas pemberontakan PKI Madiun 1948. *Kedua*, mengenal R.S. Soekanto Tjokro Diatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara (KKN), latar belakang lahirnya 1 Juli sebagai Hari Bhayangkara, dan organisasi Polri setelah kepolisian di bawah Perdana Menteri. *Ketiga*, mendeskripsikan lahirnya pendidikan Polri bagian tinggi dan menengah serta perkembangan pendidikan bagian tinggi.

Pertemuan ketiga memiliki standar kompetensi “memahami Polri

pada masa RIS (1949-1950)". Kompetensi dasar pada pertemuan ini adalah (1) menunjukkan organisasi kepolisian RIS, dan (2) menceritakan peran polri dalam menumpas pemberontakan golongan federalis.

Indikator pencapaian kompetensi pada materi tiga terdiri atas dua hal. *Pertama*, menjelaskan organisasi kepolisian Republik Indonesia Serikat. *Kedua*, menjelaskan Polri dalam menumpas APRA, Gerakan Andi Azis, dan gerakan RMS.

Pertemuan keempat memiliki standar kompetensi "Memahami Polri pada masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)". Kompetensi dasar pada pertemuan ini adalah sebagai berikut. (1) menunjukkan organisasi kepolisian; (2) menggambarkan pembangunan Polri; (3) menceritakan lahirnya Tri Brata Polri, Panji-Panji Polri; (4) menceritakan Ops Kamdari yang dilakukan Polri.

Pada pertemuan keempat, terdapat beberapa indikator pencapaian kompetensi. *Pertama*, mendeskripsikan organisasi Polri dalam rangka NKRI dan pembentukan komisariat-komisariat kepolisian. *Kedua*, mendeskripsikan pembentukan Polisi Perairan dan Udara, Polisi Perintis, pembangunan Djawatan Kepolisian Nasional (DKN), pembentukan *National Central Beureau* (NCB)/ Interpol, Hubungan Masyarakat (*public relation*), dan pembentukan persatuan isteri Polri "bhayangkari". *Ketiga*, menjelaskan Tri Brata sebagai pedoman hidup anggota Polri dan Panji-Panji Polri. *Keempat*, menjelaskan peran Polri dalam menumpas DI/TI dan PRRI/Permesta.

Pertemuan kelima memiliki standar kompetensi "memahami Polri pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1966". Kompetensi dasar pada pertemuan ini adalah (1) menceritakan kebijakan pimpinan Polri pada masa Demokrasi Terpimpin; (2) menjelaskan in-

tegrasi kepolisian ke dalam ABRI; (3) menjelaskan pedoman kerja dan doktrin Polri; (4) menjelaskan peranan Poli dalam Ops Kamdagri.

Di pertemuan kelima, terdapat lima indikator pencapaian kompetensi. *Pertama*, menjelaskan kebijakan R. Sekarno Djojonegoro, R. Soetjipto Danoekoesoemo, R. Soetjopto Joedodihardjo. *Kedua*, menjelaskan Tap MPR No II/1960, UU Pokok Kepolisian No 13/1961, Kepres No 290/Plt Th. 1964. *Ketiga*, menjelaskan lahirnya Catur Prasetya dan Doktrin Polri Tata Tentrem Kerta Raharja. *Keempat*, menjelaskan peran Polri dalam Trikora, Dwikora, dan dalam penumpasan G 30 S/PKI.

Pertemuan keenam memiliki standar kompetensi "memahami Polri pada masa Orde Baru (1966-1998)". Kompetensi dasar pada pertemuan ini adalah (1) menggambarkan integrasi ABRI, dan (2) menjelaskan kebijakan pimpinan Polri pada masa Orde Baru.

Pertemuan keenam memiliki beberapa indikator pencapaian kompetensi. *Pertama*, menjelaskan integrasi mental, doktrin, organisasi, dan dampak integrasi bagi Polri. *Kedua*, menjelaskan kebiakan Komjen Pol. Drs. Hoegeng Imam Santoso, Komjen Pol Drs. Moh Hasan, Jenderal Polisi Drs. Widodo Budidarmo, Jenderal Polisi Dr. Awaloedin Djamin MPA, Jenderal Pol. Anton Soedjarwo, Jenderal pol Moch. Sanusi, Jenderal Pol. Drs. Kunarto, Letjen Pol. Drs. Banurusman Astrosemitro, dan Jenderal Pol. Drs. Dibyo Widodo.

Pada pertemuan ketujuh dan kedelapan, standar kompetensi adalah "Polri pada masa Reformasi (1998-kini). Kompetensi dasar yang diharapkan adalah (1) menjelaskan kebijakan pimpinan Polri di masa Reformasi, (2) Menceritakan pemisahan Polri dan ABRI dan pemisahan Polri dari Dephan; (3) menunjukkan tugas Polri dalam mengamankan berbagai konflik; (4) menjelas-

kan kemelut mengenai organisasi Polri; (5) menggambarkan tugas Polri dalam menghadapi berbagai teror bom.

Pada pertemuan ketujuh dan kedelapan, terdapat lima indikator pencapaian kompetensi. *Pertama*, menjelaskan kebijakan Letjen Pol Drs. Roesmanhadi, Jenderal Pol. Drs. Rusdihardjo, Jenderal Pol. Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol. Drs. Da'i Bactiar, dan Jenderal Pol Drs. Sutanto. *Kedua*, menunjukkan pemisahan Polri dari ABRI dan semula ditempatkan di bawah Dephankam, kini langsung di bawah presiden. *Ketiga*, menjelaskan kerusuhan Ambon, Keta-pang, Kupang, dan Poso. *Keempat*, menjelaskan kemelut organisasi Polri dan Kapolri Kembar. *Kelima*, menjelaskan Bom Bali, Bom Hotel JW Mariot, Bom di Kedubs Australia, dan Bom Bali II.

Dari penjelasan tentang kompetensi dasar tiap pertemuan, mata kuliah Sejarah Kepolisian menyajikan model padat materi. Hal ini karena cakupan materi untuk tiap periode hanya diajarkan dalam delapan pertemuan. Dengan demikian, beban tiap pertemuan untuk menuntaskan materi menjadi makin bertambah. Hal ini berakibat adanya kecenderungan tidak diterimanya materi secara optimal, karena dalam satu pertemuan penyampaian materi tidak tuntas.

Penekanan materi dalam Sejarah Kepolisian lebih cenderung pada perjuangan, capaian, dan tokoh kepolisian. Perjuangan dan capaian kepolisian diharapkan mampu memberikan gambaran tentang semangat juang dan berbagai prestasi yang dapat diteladani. Kemudian, tokoh kepolisian yang ditampilkan menjadi teladan dalam perilaku dan kerja keras yang dilakukan.

Pelaksanaan pendidikan sejarah melalui mata kuliah Sejarah Kepolisian dirasa masih belum cukup. Hal ini karena penekanan pada materi Sejarah Kepolisian lebih bersifat internal, yakni

permasalahan kepolisian dan peran polisi dari tiap periode. Sementara itu, konteks tentang waktu terjadinya peristiwa masih belum dijelaskan. Dengan demikian, ada kecenderungan bagi taruna untuk tidak mengetahui peristiwa lain dalam periode yang sama.

Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan beberapa strategi untuk menyasati kendala dalam perkuliahan Sejarah Kepolisian. *Pertama*, pemanfaatan museum kepolisian secara optimal melalui kegiatan *discovery* yang dilakukan oleh taruna. *Kedua*, mengembangkan sistem belajar mandiri melalui penugasan terstruktur untuk memberikan tambahan wawasan dan upaya penuntasan terhadap materi yang disampaikan. *Ketiga*, pengembangan pembelajaran dengan alokasi khusus untuk mengunjungi lokasi bersejarah untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap materi. *Keempat*, peninjauan terhadap kurikulum sejarah kepolisian untuk mengakomodasi berbagai peristiwa yang terkait dengan sejarah kepolisian.

SIMPULAN

Pendidikan sejarah bagi polisi sipil berperan dalam memberikan keteladanan dan semangat untuk berjuang. Hal ini dilakukan melalui perkuliahan Sejarah Kepolisian. Mata kuliah ini diberikan pada taruna pada semester pertama. Melalui perkuliahan selama delapan pertemuan, taruna diberikan materi tentang sejarah kepolisian sejak prakemerdekaan sampai masa reformasi. Namun demikian, padatnya materi yang tidak diimbangi dengan alokasi waktu yang maksimal menyebabkan perkuliahan terkendala. Hal ini karena cakupan materi untuk tiap periode hanya diajarkan dalam delapan pertemuan. Dengan demikian,

beban tiap pertemuan untuk menuntaskan materi menjadi makin bertambah. Hal ini berakibat adanya kecenderungan tidak diterimanya materi secara optimal, karena dalam satu pertemuan penyampaian materi tidak tuntas.

DAFTAR PUSTAKA

- Collingwood, R.G. 1990. *The Idea of History*. London: Oxford University Press.
- Institute for Defense, Security and Peace Studies. 2008. *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*. Dalam <http://www.idsps.org>. (diunduh 13 Oktober 2011)
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- Ketetapan MPR RI No VI Tahun 2000 tentang pemisahan ABRI (TNI dan Polri)
- Ketetapan MPR RI No VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan POLRI
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya
- Lebang, 1. 2003. *Idealisme Tampilan Akademi Kepolisian Menuju pada Etalase Pendidikan Polisi Profesional*. Semarang: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian.
- Muradi. 2007. *Reformasi Brimob Polri: Antara Tradisi Militer dan Kultur Polisi Sipil*. <http://muradi.wordpress.com/2007/06/15/reformasi-brimob-polri-antara-tradisi-militer-dan-kultur-polisi-sipil/> (diunduh 31 Oktober 2011)
- Subagyo dan Suwandi. 2001. *Sejarah Perjuangan Polri*. Semarang: Akpol
- Subagyo. 2010. *Membangun Kesadaran Sejarah*. Semarang: FIS UNNES
- . 2012. "Model Pendidikan Tarunaakademi Kepolisian Sebagai Pembangun Karakter Polisi Sipil". *Disertasi*. Program S3 Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang.
- Surat Keputusan Ka.Polri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Kepolisian
- Surat Keputusan Ka.Polri No.Pol: Skep/962/XI/2002, tanggal 29 Nopember 2002
- Surat Keputusan Ka.Polri: No.Pol : Kep/60/XII/2002, tanggal 27 Desember 2002
- UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- Wasino. 2007. *Dari Riset hingga Tulisan Sejarah*. Semarang: Unnes Press
- Wineburg, Sam. 2006. *Berpikir Historis: Memetakan Masa Depan Mengajarkan Masa Lalu*. Penerjemah Masri Maris . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.